

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang penulis sajikan pada sub-bab sebelumnya, maka dapat dapat disimpulkan bahwa:

1. Penurunan suara PKS, PAN dan Demokrat dalam pemilihan legislatif tahun 2004, 2009, 2014 di Kecamatan Padang Barat di pahami sebagai krisis legitimasi, krisis legitimasi terjadi dalam bentuk peralihan pemberian suara yang disebabkan oleh hilangnya kepercayaan pemilih sehingga beralih memberikan legitimasi kepada partai Gerindra, Nasdem dan Golkar yang berdampak pada turunya perolehan suara partai PKS, PAN dan Demokrat. Peralihan penetapan suara pemilih di Kecamatan Padang Barat di pengaruhi oleh hubungan kekerabatan (saling kenal mengena), *patronase*, dan *money politik* seperti pemberian uang tunai dan sembako.
2. Secara umum penyebab terjadinya penurunan suara PKS, PAN, dan Demokrat dilatarbelakangi oleh masalah yang berdeda-beda. *Pertama*, menurunnya suara PKS terjadi karena rendahnya kualitas kader yang tersebar di Padang Barat, dan adanya keberadaan partai dominator (Gerindra, Golkar dan Nasdem). *Kedua*, PAN disebabkan oleh diberlakukannya peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 dan pilihan menjadi golput. *Ketiga* penurunan suara oleh Demokrat terjadi karena menurunnya legitimasi tokoh partai Demokrat.

4.2 Saran

Setelah memahami mengapa terjadi penurunan suara PKS, PAN dan Demokrat tahun 2004, 2009, 2014 dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Padang Barat, ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan dari hasil penelitian ini:

1. Melihat terjadinya penurunan suara PKS, PAN, dan Demokrat di Kecamatan Padang Barat, peneliti menyarankan kepada pengurus aktif PKS, PAN, dan Demokrat dapat memperbanyak jumlah kader khususnya di Kecamatan Padang Barat agar partai memiliki peluang untuk memperoleh legitimasi pemilih sebagai salah satu upaya strategis dalam menaikkan perolehan suara dalam pemilihan legislatif.
2. Pemilih hendaknya cermat dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum karena legitimasi menjadi sumber penting bagi keberlangsungan suatu sistem sosial dalam negara sehingga penetapan pilihan harus didasari kesadaran politik bukan di pengaruhi oleh unsur *money politik*. Untuk kader partai PKS, PAN dan Demokrat agar mengupayakan dan mengurangi tindakan *money politik* sebagai strategi praktis dan illegal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 86 Ayat 1 tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD dengan melarang memberikan janji-janji politik dan materi untuk memperoleh dukungan suara.
3. Penulis juga menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini bukanlah hasil yang mutlak, mengingat penelitian sosial bersifat dinamis dapat berubah setiap saat berdasarkan ruang dan waktu. Oleh karena itu penulis

mencoba memberikan saran dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat menambah cakupan wilayah penelitian karena penelitian ini hanya berada pada cakupan wilayah yang terbatas pada hanya pada satu kecamatan.

